JURNAL MSDM
Manajemen Sumber Daya Manusia
ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN PEMBUATAN SASISARANGAN DI DESA TELUK BAYUR KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN

Khalifatun Nisa[1], Siti Raudah[2] , Selamat Riadi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Amuntai
e-mail: nisakhalifatun2@gmail.com

ABSTRAK

Efektivitas Program Pelatihan Pembuatan Sasirangan di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, menunjukkan hasil yang belum optimal. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi terhadap 12 informan, riset ini mengungkap bahwa meski penetapan target peserta sudah tepat sasaran, pilar penting lainnya seperti sosialisasi, pencapaian target, pemahaman tujuan, dan pengawasan masih sangat lemah. Kendala utama bersumber dari tiadanya pendampingan dan evaluasi pascapelatihan, yang diperparah oleh minimnya penyebaran informasi dan renggangnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Dinamika program ini dipengaruhi oleh aspek pendukung berupa tingginya antusiasme warga, sokongan dana desa, serta fasilitas yang representatif. Sebaliknya, faktor penghambat yang dominan meliputi mandeknya komunikasi lanjutan dan absennya monitoring berkala, sehingga peningkatan keterampilan masyarakat belum membuahkan dampak ekonomi yang signifikan. Guna mengatasi stagnasi ini, pemerintah desa direkomendasikan untuk memperluas jangkauan sosialisasi, mengalokasikan anggaran khusus untuk pembinaan berkelanjutan, serta memperkuat sistem pengawasan. Di sisi lain, para alumni pelatihan dituntut untuk lebih proaktif dalam mengasah kreativitas dan mengonversi keahlian yang telah didapat menjadi peluang usaha mandiri demi mendongkraf taraf hidup keluarga.

Kata kunci: efektivitas program, pelatihan Sasirangan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan

ABSTRACT

An analysis of the effectiveness of the Sasirangan Making Training Program in Teluk Bayur Village, Juai District, Balangan Regency, showed suboptimal results. Using a descriptive qualitative approach through interviews and observations with 12 informants, this research revealed that although the target participants were well-targeted, other important pillars such as socialization, target achievement, goal understanding, and supervision remained very weak. The main obstacle stemmed from the lack of post-training mentoring and evaluation, which was exacerbated by minimal information dissemination and weak coordination between stakeholders. The program's dynamics were influenced by supporting aspects such as high community enthusiasm, village funding support, and adequate facilities. Conversely, dominant inhibiting factors included a stagnation in follow-up communication and the absence of regular monitoring, resulting in the community's skills improvement not yet yielding a significant economic impact. To address this stagnation, the village government was recommended to expand the reach of socialization, allocate a special budget for ongoing development, and strengthen the monitoring system. Furthermore, training alumni were urged to be more proactive in honing their creativity and converting their acquired skills into independent business opportunities to improve their families' standard of living.

Keywords: *program effectiveness, Sasirangan training, community empowerment, skills training.*

ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah perdesaan kini menjadi poros krusial bagi pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. Orientasi kebijakan ini tidak sekadar bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan menyasar pada aspek pemberdayaan manusia yang aplikatif guna mendongkrak kapasitas sumber daya lokal. Salah satu instrumen pemberdayaan yang kerap diimplementasikan adalah pembekalan kemahiran kerja, yang diproyeksikan mampu menstimulasi kemandirian finansial warga desa. Langkah strategis ini dinilai mendesak lantaran sebagian besar entitas masyarakat masih terbelenggu oleh keterbatasan kompetensi produktif yang berakibat pada fluktuasi pendapatan di sektor informal. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah intervensi nyata berupa program pelatihan yang selaras dengan karakteristik ekonomi setempat.

Melihat urgensi tersebut, Desa Teluk Bayur menginisiasi program pembuatan kain sasirangan sejak periode tahun 2025 dengan menggandeng instansi lintas sektor. Sasirangan, sebagai produk kriya tekstil tradisional khas Kalimantan Selatan, dinilai memiliki keunggulan komparatif dan nilai ekonomi yang menjanjikan di pasaran. Pelatihan yang melibatkan sembilan peserta dari kalangan pemuda serta ibu rumah tangga ini diselenggarakan selama delapan hari di balai desa dengan mengadopsi metodologi praktik terapan secara langsung. Proses pembelajaran dirancang secara bertahap, diawali dari introduksi material dasar seperti kain mori, zat pewarna, dan perlengkapan jahit, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan motif pola sederhana. Fase krusial terletak pada teknik penjelujuran dan pengikatan kain yang menentukan kualitas visual ornamen, diikuti proses pewarnaan celup, pencampuran corak, hingga tahap akhir pengeringan serta edukasi manajemen niaga.

Kendati antusiasme dan interaksi peserta tergolong tinggi sepanjang kegiatan berlangsung, realitas pasca-program menunjukkan dinamika yang kontradiktif. Berdasarkan amatan mendalam, sebagian besar alumni pelatihan tidak mentransformasikan pemahaman teknis mereka menjadi lini produksi yang berkelanjutan, sehingga kontribusi program terhadap penguatan ekonomi makro desa masih minim. Hambatan utama bersumber dari ketiadaan pendampingan berkala pasca-edukasi, yang mengakibatkan para peserta kerap memilih berhenti ketika menemui kendala teknis pada pembuatan motif serumit apa pun. Pemerintah desa pun dinilai belum optimal dalam memformulasikan kebijakan lanjutan, seperti fasilitasi kelompok usaha bersama, pengadaan sentra produksi terpadu, maupun jaringan pemasaran. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan modal finansial peserta mandiri untuk membeli bahan baku, sehingga keterampilan yang didapat membeku tanpa realisasi ekonomi yang produktif.

Kondisi diskrepansi antara ekspektasi perencanaan dan realitas di lapangan mengindikasikan adanya ruang evaluasi yang besar pada efektivitas program. Masalah mendasar mencakup minimnya supervisi komprehensif dari penyelenggara yang membuat kendala peserta tidak termitigasi secara cepat, di samping saluran informasi pelatihan yang belum menyebar merata ke seluruh lapisan masyarakat sasaran. Padahal, merujuk pada prinsip dasarnya, keberhasilan sebuah pelatihan tidak boleh berhenti pada seremonial penyerapan anggaran semata, melainkan diukur dari ketepatan waktu, kemandirian usaha, dan dampak kesejahteraan yang menetap. Atas dasar problematika struktural tersebut, asesmen mendalam mengenai derajat keberhasilan operasional program menjadi hal yang sangat krusial guna memotret performa kebijakan publik di level akar rumput.

Dalam diskursus ilmu administrasi publik, konsep efektivitas memegang peranan sentral sebagai indikator keberhasilan intervensi program pemerintah. Konseptualisasi efektivitas secara teoretis dipahami sebagai relasi kausalitas antara target yang direncanakan dengan output riil yang

diwujudkan oleh sebuah organisasi. Menurut Beni (2016:69), efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran dan tujuan, atau sebagai alat ukur guna melihat seberapa jauh tingkat kebijakan serta prosedur organisasi dapat terlaksana. Selaras dengan pandangan tersebut, Mardiasmo (2016:134) menegaskan bahwa efektivitas ialah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi, di mana entitas tersebut dinilai efektif apabila mampu merealisasikan target sasarannya. Selanjutnya, Sedarmayanti (2018:59) memformulasikan konsep ini sebagai ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai melalui serangkaian aktivitas.

Elaborasi teoretis mengenai efektivitas juga dikembangkan oleh sejumlah pakar untuk melihat keterkaitan operasional antara hasil kerja dengan ekspektasi kelembagaan. Lysa Angrayni dan Yusliati (2018:13) menyatakan bahwa terminologi efektivitas berakar dari kata efektif yang esensinya menitikberatkan pada tercapainya keberhasilan dalam merealisasikan tujuan institusional, dengan selalu menyandingkan hasil yang diharapkan dan hasil nyata. Penilaian terhadap dimensi ini dapat ditinjau melalui instrumen yang dikemukakan oleh Budiani dalam Dedi Amrizal (2018:59), yang membagi parameter ukur ke dalam empat pilar utama, yakni ketepatan sasaran program, intensitas sosialisasi program, kesesuaian tujuan program dengan output, serta konsistensi pemantauan program secara berkala. Melalui integrasi variabel-variabel tersebut, derajat keberhasilan pemanfaatan sumber daya dan ketepatan gunaan suatu kebijakan publik dapat dipetakan secara terstruktur.

Di sisi lain, aspek substansial dari program pemberdayaan ini tidak dapat dilepaskan dari teori pelatihan sebagai pilar pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Edy Sutrisno (2016:67-68), pelatihan diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk meningkatkan kompetensi kerja karyawan melalui perluasan khazanah pengetahuan, pengasahan keterampilan, serta transformasi sikap kerja agar operasional tugas berjalan lebih efektif dan efisien. Definisi ini diperkuat oleh pandangan Priansa (2016) yang mengidentifikasi pelatihan sebagai upaya terencana demi mengembangkan modal manusia guna memenuhi kebutuhan organisasi dan menaikkan performa individu. Ketika dikorelasikan dengan program perdesaan, model pembekalan kompetensi berdurasi pendek ini idealnya berfungsi sebagai katalisator pengubah perilaku dan keahlian masyarakat agar lebih siap menghadapi tuntutan ekonomi yang dinamis.

Secara makro, keseluruhan rangkaian riset ini bermaksud membedah efektivitas program pembekalan kerajinan lokal dengan menggunakan pisau analisis teori administrasi dan pengembangan kapasitas. Ketidakmatangan kompetensi akibat durasi yang singkat serta rapuhnya sistem pendukung pasca-kegiatan menjadi poin kritis yang membutuhkan pemecahan komprehensif. Dengan menggabungkan perspektif teoretis mengenai manajemen pencapaian tujuan organisasi dan konsep standardisasi program pelatihan kerja, studi ini berupaya memformulasikan model perbaikan kebijakan yang aplikatif. Diharapkan, rekonstruksi pola pembinaan pasca-pelatihan dan penguatan skema permodalan mampu mengubah stimulus jangka pendek pemerintah menjadi determinan kesejahteraan sosial-ekonomi yang tangguh dan mandiri bagi komunitas lokal.

METODE

Penentuan lokasi dalam pelaksanaan riset ilmiah memiliki urgensi yang sangat fundamental agar seluruh data yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Eksplorasi empiris mengenai tingkat keberhasilan program pembekalan keterampilan ini secara spesifik diselenggarakan di wilayah perdesaan Kalimantan Selatan, tepatnya pada lingkup administratif Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Pemilihan lokus tersebut didasarkan pada dinamika

permasalahan riil seputar keberlanjutan pasca-kegiatan, sehingga peneliti memfokuskan amatan pada Efektivitas Program Pelatihan Pembuatan Sasirangan di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Melalui penentuan tempat yang terfokus, seluruh konteks kultural dan struktural masyarakat setempat dapat dipotret secara utuh demi menguji keberhasilan program pemberdayaan.

Guna mengupas tuntas fenomena tersebut, rancangan metodologi yang diaplikasikan adalah pendekatan kualitatif dengan penekanan pada penggalian informasi mendalam di lapangan. Merujuk pada pemikiran Sugiyono (2016:9), pendekatan kualitatif dimaknai sebagai metode riset ilmiah yang berakar pada paradigma filsafat postpositivisme, diimplementasikan untuk menginvestigasi kondisi objek yang natural, menempatkan peneliti sebagai instrumen inti, menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data, serta mengadopsi analisis induktif yang mengutamakan kedalaman makna daripada generalisasi ruang lingkup. Konseptualisasi ini diperkuat oleh Creswell (2016) yang mendefinisikan riset kualitatif sebagai cara untuk menelaah serta memahami arti yang dilekatkan pada problem kemanusiaan atau sosial. Sejalan dengan itu, Hardani dkk. (2020:40) menegaskan bahwa peneliti kualitatif mengawali kerjanya dengan menyelami gejala sentral secara total melalui keterlibatan langsung di lapangan dengan pemikiran terbuka guna memunculkan impresi yang objektif.

Penerapan metode deskriptif kualitatif dalam studi ini bertujuan untuk menyajikan potret utuh mengenai realitas empiris yang diteliti. Orientasi utama tipe deskriptif ini berfokus pada upaya menguraikan, mendeskripsikan, dan memaparkan suatu peristiwa atau dinamika program secara faktual sesuai kondisi riil di lokasi riset tanpa adanya manipulasi eksperimental. Pandangan Sugiyono (2018) memperjelas bahwa jenis deskriptif ditujukan untuk melukiskan fenomena secara sistematis, akurat, dan berbasis fakta aktual yang dijumpai di area kerja. Lewat pendekatan ini, mekanisme pelaksanaan pelatihan kain tradisional beserta problematika strukturalnya dapat diekspos secara transparan, memberikan gambaran utuh tentang bagaimana efektivitas sebuah kebijakan publik diimplementasikan pada tingkat desa.

Terkait dengan material analisis, struktur data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua pilar utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada informasi autentik yang dihimpun secara langsung oleh pengumpul data dari narasumber utama melalui teknik wawancara mendalam serta observasi lingkungan. Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa data primer merupakan jenis sumber yang secara langsung menyuplai data kepada peneliti tanpa melalui perantara pihak ketiga. Sementara itu, data sekunder diaplikasikan sebagai elemen penunjang yang diperoleh secara tidak langsung, bersumber dari arsip kelembagaan Kantor Desa Teluk Bayur maupun studi kepustakaan atas literatur regulasi relevan. Hal ini selaras dengan pernyataan Sugiyono (2018) bahwa data sekunder didapatkan lewat perantara orang lain atau penelusuran dokumen pendukung.

Penentuan unit analisis atau pemberi informasi didasarkan pada subjek yang menguasai problem riset melalui mekanisme purposive sampling. Rukin (2021) mendefinisikan sumber data sebagai entitas berupa informan, aktivitas, maupun kondisi spasial yang diamati untuk memberikan kejelasan informasi seputar fokus kajian. Peneliti menetapkan dua belas orang informan yang dinilai memiliki persentuhan langsung dengan program, yang terdiri atas Kepala Desa Rahmadi, Sekretaris Desa Supriadi, seorang Aparat Desa bernama Tajudinor, serta sembilan alumni pelatihan yaitu Miftahur Rahmah, Rabiatus Sa'adah, Marlina, Ratu Dewi, Hayatun Nufus, Siti Hajar, Siti Zulaikha, Hartati, dan Rinawati. Seluruh informan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu guna memastikan objektivitas data.

Operasionalisasi pengukuran konsep efektivitas dalam riset ini merujuk sepenuhnya pada bangunan teoretis Budiani (2018:59), yang memecah variabel menjadi empat sub-variabel dan

indikator turunan. Sub-variabel pertama adalah ketepatan sasaran program yang diukur melalui kesesuaian target penerima manfaat. Elemen kedua berupa sosialisasi program yang menitikberatkan pada kejelasan distribusi informasi dan pemahaman publik. Pilar ketiga menyasar tujuan program melalui indikator pelaksanaan riil serta dampak nyata hasil pembekalan. Terakhir, sub-variabel pemantauan program dinilai lewat aktivitas monitoring berkala beserta evaluasi pasca-kegiatan. Desain operasional ini berfungsi sebagai instrumen pemandu agar proses pencarian data berjalan lebih teratur dan sistematis.

Proses pengumpulan data di lapangan mengkombinasikan tiga instrumen utama yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi secara terpadu. Hardani dkk. (2020:120-121) mengingatkan bahwa pengumpulan data adalah fase paling strategis demi memenuhi pemenuhan standar riset yang baku. Pengamatan visual ditopang oleh gagasan Nasution dalam Sugiyono (2019:297) yang menempatkan observasi sebagai fondasi semua ilmu pengetahuan berbasis realitas kenyataan. Fiantika dkk. (2022) melengkapi bahwa observasi merekam perilaku dan kondisi faktual objek. Untuk wawancara, peneliti mengacu pada konsep Najir dalam Hardani dkk. (2020:138) sebagai proses tatap muka berbasis interview guide. Kegiatan dokumentasi kemudian memperkuat data tersebut melalui pencatatan arsip tertulis sesuai arahan Hardani dkk. (2020:149) serta pengumpulan bukti gambar pendukung mengacu pada prinsip Sugiyono (2018:476).

Fase pengolahan informasi memanfaatkan model analisis interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Hardani dkk. (2020:163), yang membagi siklus kerja ke dalam tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertindak sebagai proses penajaman, penggolongan, dan pembuangan informasi tidak relevan dari catatan lapangan. Tahap berikutnya, yakni penyajian data, mengorganisasikan matriks informasi ke dalam teks naratif yang mudah dipahami demi menghindari kesalahan konklusi kognitif akibat kompleksitas data. Sebagai langkah akhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan guna menghasilkan interpretasi kredibel yang didukung oleh bukti lapangan yang valid dan konsisten. Guna menjaga keabsahan temuan tersebut, Sugiyono (2019:365) mengamanatkan uji kredibilitas data yang diimplementasikan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan riset, triangulasi metode, analisis kasus negatif, pemanfaatan bahan referensi, serta pengecekan kembali lewat member check kepada para informan.

PEMBAHASAN

A. Efektitivas Program Pelatihan Pembuatan Sasirangan Di Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

1. Ketepatan Sasaran Program
   a. Kesesuaian Sasaran

      Akurasi bidikan sasaran mencerminkan derajat ketepatan dalam mengidentifikasi serta menjangkau kelompok penerima manfaat berdasarkan kriteria baku, guna menjamin alokasi program menyasar pihak yang membutuhkan dan menyokong keberhasilan tujuan institusi. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan dialog mendalam di lapangan, pelaksanaan Program Pelatihan Pembuatan Sasirangan terbukti telah berjalan secara efektif dan tepat guna. Indikator keberhasilan ini tecermin dari mekanisme penjaringan peserta yang memprioritaskan warga lokal dengan motivasi tinggi serta komitmen penuh untuk menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan. Realitas empiris tersebut selaras dengan pilar teoretis yang dirumuskan oleh Budiani (2018: 59), yang menegaskan bahwa sebuah intervensi program dapat dikategorikan efektif jika para penerima manfaatnya bersesuaian dengan standardisasi atau target sasaran yang telah dikonseptualisasikan sebelumnya,

sehingga akselerasi pencapaian tujuan organisasi dapat terealisasi secara maksimal di tingkat akar rumput.

b. Target Program

Target program mencerminkan capaian akhir yang hendak diwujudkan melalui serangkaian intervensi kebijakan publik demi memenuhi sasaran yang telah dikonseptualisasikan sebelumnya. Penilaian terhadap dimensi ini diukur berdasarkan derajat keberhasilan pemenuhan rencana serta multiplikasi manfaat riil yang diperoleh masyarakat sasaran. Berdasarkan kompilasi hasil wawancara mendalam dan pengamatan visual di lapangan, dapat disimpulkan bahwa target capaian dari program pembekalan kriya tekstil tradisional ini belum berjalan secara efektif. Kendati proses transfer pengetahuan teknis berjalan lancar selama kegiatan, output operasionalnya belum terealisasi secara utuh. Realitas ini terkonfirmasi dari absennya program pendampingan lanjutan berkelanjutan serta minimnya alumni yang mampu mentransformasikan keahlian tersebut menjadi aktivitas ekonomi produktif pasca-kegiatan. Fakta empiris ini mengindikasikan bahwa esensi program belum terpenuhi jika dibedah menggunakan pisau analisis Budiani (2018:59). Budiani merumuskan bahwa target program berpusat pada sejauh mana tingkat pemenuhan sasaran yang telah ditetapkan, di mana efektivitas baru diakui apabila hasil nyata di lapangan selaras dengan ekspektasi perencanaan awal.

2. Sosialisasi Program

a. Kejelasan Informasi

Dimensi kejelasan informasi merepresentasikan sebuah kondisi saat pesan yang didistribusikan kepada publik mampu dicerna secara komprehensif, utuh, serta gamblang, sehingga masyarakat target mengerti substansi tujuan, mekanisme operasional, beserta regulasi teknis suatu kebijakan. Bersandar pada kompilasi data observasi lapangan dan wawancara mendalam, peneliti mengonstruksikan kesimpulan bahwa jajaran otoritas desa sebenarnya telah mengupayakan diseminasi wacana mengenai Program Pelatihan Pembuatan Sasirangan melalui perpanjangan tangan aparat pemerintahan desa serta jajaran Ketua RT. Kendati demikian, transmisi pesan tersebut dinilai belum berjalan secara prima lantaran masih dijumpai sejumlah warga yang sama sekali tidak mengendus keberadaan agenda pembekalan ini. Kesenjangan komunikasi ini dipicu oleh aktivitas penyuluhan yang kurang masif, sehingga detail krusial menyangkut esensi program, linimasa pelaksanaan, penentuan lokasi, hingga prasyarat pendaftaran gagal tersalurkan secara merata. Kenyataan di lapangan ini mengindikasikan bahwa indikator sosialisasi program masih berada pada level yang tidak efektif. Menilik landasan teoretis yang diformulasikan oleh Budiani (2018:59), parameter sosialisasi program memegang kedudukan sentral sebagai penentu derajat efektivitas suatu kebijakan publik. Dalam konteks studi ini, meskipun pihak pamong desa telah menyebarkan maklumat pelatihan, keterbatasan jangkauan sebaran informasi yang memicu ketidaktahuan sebagian masyarakat sasaran membuktikan bahwa implementasi program belum memenuhi standar keberhasilan yang optimal.

b. Pemahaman Masyarakat

Tingkat pemahaman kolektif warga perdesaan mengenai esensi Program Pelatihan Pembuatan Sasirangan yang mencakup aspek orientasi, faedah jangka panjang, segmentasi peserta, modul pembelajaran, hingga teknis operasional—menjadi determinan penting agar program pemberdayaan ini dapat diinternalisasi secara optimal. Kendati demikian,

serangkaian amatan empiris dan dialog mendalam di lapangan mengindikasikan bahwa pemahaman konstituen di Desa Teluk Bayur masih jauh dari kategori efektif. Walaupun beberapa alumni pelatihan mengerti bahwa kegiatan ini bertujuan mengasah keahlian motorik kriya tekstil, sebagian besar target sasaran belum menangkap signifikansi program sebagai stimulus pembukaan lapangan usaha mandiri. Kesenjangan informasi ini berakar dari model diseminasi yang kurang terperinci, sehingga menuntut jajaran aparatur desa untuk merekonstruksi pola komunikasi publik secara lebih komprehensif. Realitas tersebut menegaskan adanya diskrepansi dengan grand theory yang dipaparkan oleh Budiani (2018:59), yang menempatkan sosialisasi program sebagai parameter vital efektivitas kebijakan, di mana indikator keberhasilannya diukur langsung dari kedalaman pemahaman masyarakat sasaran dalam menyerap serta mengimplementasikan informasi program.

3. Tujuan Program
   a. Pelaksanaan Program

      Operasionalisasi suatu program merupakan manifestasi dari serangkaian aktivitas terstruktur yang diselenggarakan oleh agen eksekutor demi merealisasikan target-target yang telah dicanangkan sebelumnya. Merujuk pada realitas empiris di lapangan, implementasi agenda pembekalan kerajinan lokal di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ini terindikasi belum memperlihatkan derajat keberhasilan yang komprehensif. Fluktuasi performa tersebut jamak dipicu oleh rapuhnya jalinan komunikasi serta skema koordinasi pasca-kegiatan di antara otoritas desa, penyelenggara teknis, dan para konstituen peserta. Fenomena disfungsi ini berimbas pada absennya program asistensi berkala, supervisi berkepanjangan, serta evaluasi performa yang mendalam. Akibatnya, keterbatasan langkah tindak lanjut tersebut memicu stagnasi pada proses hilirisasi hasil produksi kemahiran peserta. Kondisi diskrepansi ini secara konseptual bertolak belakang dengan postulat teoretis Budiani (2018:59), yang menggarisbawahi bahwa tolok ukur efektivitas sebuah kebijakan wajib bersandar pada indikator capaian tujuan akhir, yakni derajat kemampuan program dalam mengaktualisasikan sasaran strategis secara mutlak. Faktanya, program ini baru sebatas mentransfer pemahaman elementer tanpa mampu menstimulasi kemandirian ekonomi yang menetap dan berkesinambungan bagi masyarakat lokal.

   b. Dampak Pelatihan

      Konsekuensi pasca-edukasi pada dasarnya merepresentasikan transformasi kompetensi yang timbul setelah individu menuntaskan program pembekalan, baik mencakup perluasan cakrawala kognitif, penajaman keahlian teknis, kapasitas diri, hingga modifikasi sikap kerja dalam mengaplikasikan materi. Penelusuran empiris mengindikasikan bahwa agenda pengasahan kerajinan tradisional di Desa Teluk Bayur sejatinya telah menstimulasi kemajuan wawasan serta kemahiran fundamental para alumni. Kendati demikian, output tersebut dinilai belum berdaya guna secara masif lantaran ketiadaan intervensi lanjutan pasca-kegiatan, seperti supervisi berkala, pembinaan intensif, dan monitoring terpadu dari otoritas perdesaan. Implikasinya, para peserta kerap terbentur problem operasional saat mencoba merealisasikan dan mengeksplorasi keahlian baru mereka secara mandiri. Realitas ini berbenturan dengan premis teoretis Budiani (2018:59) yang menggarisbawahi bahwa derajat keberhasilan sebuah kebijakan diukur dari ketercapaian tujuannya, yakni seberapa jauh stimulus mampu mendistribusikan utilitas serta pembaruan substantif bagi kelompok sasaran. Walhasil, program kriya

sasirangan ini belum beroperasi secara optimal disebabkan target keberlanjutan ekonomi jangka panjang bagi entitas lokal belum terwujud secara paripurna.

4. Pemantauan Program
   a. Monitoring Pelaksanaan Program

      Monitoring pelaksanaan program pada hakikatnya merupakan aktivitas supervisi berkala yang diorientasikan untuk mengawal jalannya program agar tetap selaras dengan cetak biru perencanaan yang telah disepakati. Berdasarkan telaah empiris melalui observasi langsung dan dialog mendalam di lapangan, parameter pemantauan pada program pembekalan kriya kain tradisional di Desa Teluk Bayur dinilai belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini terkonfirmasi dari absennya sistem pengawasan serta evaluasi yang berkesinambungan guna meninjau progres kemampuan para alumni usai agenda tersebut ditutup. Otoritas penentu kebijakan di level perdesaan cenderung membatasi pengawasan hanya pada saat fase pelatihan bergulir, sehingga gagal mendeteksi sejauh mana implementasi dan pengembangan keahlian mandiri di tingkat masyarakat. Realitas ini menegaskan bahwa intervensi yang ada belum mampu memenuhi standar teoretis Budiani (2018:59), yang mengamanatkan bahwa pengawasan serta peninjauan progresif mutlak diperlukan demi menjamin akselerasi pencapaian tujuan program publik secara optimal dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

   b. Evaluasi Hasil Pelatihan

      Asesmen terhadap output pembekalan merupakan instrumen kritisi yang esensial guna memetakan derajat pencapaian sasaran institusional sekaligus mendeteksi transformasi kompetensi riil para alumni pasca-kegiatan. Realitas empiris lewat amatan mendalam dan dialog terstruktur membuktikan bahwa aksentuasi peninjauan hasil program kriya tekstil di Desa Teluk Bayur berjalan stagnan dan belum menyentuh taraf efektif. Ketiadaan mekanisme kontrol periodik membuat otoritas desa kehilangan basis data valid untuk memitigasi kendala alumni maupun menakar rasio keberhasilan program sebagai pijakan pembenahan kebijakan ke depan. Kondisi anomali ini jelas bertolak belakang dengan postulat efektivitas sistemik dari Budiani (2018:59) yang menggarisbawahi bahwa pilar pemantauan wajib mengintegrasikan aktivitas monitoring terpadu dan evaluasi berkelanjutan demi mengukur capaian sekaligus menjadi landasan rekonstruksi program. Karena parameter penilaian performa serta tracking perkembangan alumni ini diabaikan, maka dimensi evaluasi hasil pembekalan sasirangan di wilayah tersebut dikategorikan belum berdaya guna secara optimal.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Pelatihan Pembuatan Sasirangan Di Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

1. Faktor Pendorong

   a. Adanya program desa yang berkaitan dengan pemberdayaan Masyarakat

      Berdasarkan data observasi dan wawancara, eksistensi program perdesaan yang berorientasi pada pemberdayaan humanis menjadi katalisator positif dalam menyokong implementasi pelatihan kriya sasirangan di Desa Teluk Bayur. Intervensi kebijakan ini memberikan stimulan operasional sekaligus membuka ruang bagi warga untuk menyerap modal pengetahuan serta kecakapan teknis yang baru. Pelatihan sejatinya merupakan proses terencana untuk mendongkrak kompetensi masyarakat melalui perluasan wawasan dan kemahiran agar produktivitas berjalan optimal. Kesinambungan program ini terbukti

mampu menstimulasi antusiasme lokal demi tercapainya kemandirian ekonomi.

b. Tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan

Mengenai kekuatan pengamatan lapangan, data riil hasil wawancara dan observasi membuktikan bahwa tingginya animo serta keterlibatan aktif warga menjadi pilar penyokong utama keberhasilan agenda pemberdayaan di Desa Teluk Bayur. Semangat yang diperlihatkan para peserta dalam melakoni setiap fase kegiatan, ditambah interaksi yang dinamis sepanjang bimbingan teknis berjalan, secara nyata memberikan kontribusi besar bagi kelancaran operasional program kriya tekstil ini, sekalipun dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah hambatan struktural yang mengganggu optimalisasi hasil akhirnya.

c. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelatihan

Hasil observasi serta wawancara di lapangan mengindikasikan bahwa keberadaan sarana dan prasarana bertindak sebagai elemen penunjang krusial dalam menyukseskan program pembekalan kerajinan sasirangan di Desa Teluk Bayur. Ketersediaan fasilitas tempat yang representatif, kelengkapan instrumen kerja, serta pasokan bahan baku yang memadai sangat membantu para peserta saat melangsungkan aktivitas praktik langsung. Faktor-faktor tersebut terbukti mampu menstimulasi kelancaran operasional program secara komprehensif, sehingga seluruh rangkaian proses edukasi teknis dapat terlaksana dengan optimal dan terstruktur.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya kerjasama antara penyelenggara dengan masyarakat yang mengikuti pelatihan karena tidak ada tindak lanjut

Temuan lapangan mengindikasikan bahwa lemahnya sinergi antara pihak pelaksana dan warga peserta menjadi batu sandungan utama dalam keberhasilan program pembekalan kerajinan lokal tersebut. Ketiadaan supervisi berkala, bimbingan usaha berkelanjutan, serta saluran komunikasi pasca-kegiatan memicu stagnasi bagi alumni pelatihan. Akibatnya, masyarakat binaan kerap kali mengalami kendala teknis yang menghambat mereka dalam mengaktualisasikan kemahiran kerja secara mandiri, sehingga orientasi jangka panjang untuk mendongkrak kemandirian ekonomi perdesaan gagal terwujud secara maksimal.

b. Kurangnya sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan program

Berdasarkan temuan observasi serta dialog mendalam di lapangan, minimnya diseminasi informasi terkait pementasan kegiatan menjadi determinan penghambat utama dalam agenda pembekalan kriya kain tradisional di Desa Teluk Bayur. Penyaluran maklumat kepada publik lokal dinilai belum menyentuh level optimal, sehingga memicu ketidakpahaman kolektif mengenai esensi, signifikansi, serta mekanisme operasional program secara komprehensif. Kesenjangan komunikasi makro ini pada akhirnya mengakibatkan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat perdesaan tersebut tidak mampu berakselerasi secara maksimal.

c. Kurangnya koordinasi

Berdasarkan data observasi lapangan dan hasil wawancara mendalam, dapat disimpulkan bahwa minimnya sinergi antarpihak menjadi kendala utama dalam keberlangsungan agenda pembekalan kerajinan sasirangan di Desa Teluk Bayur. Komunikasi dan penyelarasan kerja antara aparatur desa, pihak penyelenggara, serta masyarakat sasaran tidak terjalin secara konsisten. Akibat fluktuasi interaksi ini,

ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

penyampaian informasi penting seputar hambatan teknis peserta, monitoring perkembangan, serta program pendampingan lanjutan menjadi terhambat. Kondisi miskoordinasi tersebut pada akhirnya membuat implementasi program pemberdayaan ini tidak mampu mencapai hasil yang optimal.

SIMPULAN

Analisis mendalam mengenai Efektivitas Program Pelatihan Pembuatan Sasirangan di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan menunjukkan hasil evaluasi yang bervariasi pada setiap dimensi indikatornya. Meninjau sub-variabel ketepatan sasaran, aspek kesesuaian target mencatat capaian yang baik karena kuantitas warga yang dilibatkan telah selaras dengan regulasi ketetapan aparatur desa. Namun, indikator target program dinilai kurang baik akibat rapuhnya komitmen kerja sama pasca-kegiatan antara pihak penyelenggara dan masyarakat. Penilaian kurang baik juga mendominasi dimensi sosialisasi program, di mana elemen kejelasan informasi dinilai minim publikasi, sementara indikator pemahaman masyarakat masih rendah akibat edukasi yang belum memaparkan esensi serta urgensi kemanfaatan program secara mendalam dan berkesinambungan. Pada sub-variabel tujuan program, indikator pelaksanaan kegiatan dikategorikan kurang baik lantaran relasi koordinasi multipihak yang terputus, yang berkolerasi linear dengan indikator dampak pelatihan yang juga kurang baik karena nihilnya skema pembinaan mutakhir. Begitu pula dengan aspek pemantauan program, baik indikator monitoring maupun evaluasi hasil pelatihan menorehkan rapor kurang baik akibat ketiadaan supervisi reguler serta penilaian khusus terhadap performa usaha alumni pasca-pelatihan selesai. Di balik potret capaian tersebut, terdapat dinamika faktor determinan yang terbagi atas aspek pendukung dan penghambat operasional program. Faktor akselerasi yang melandasi kelancaran aktivitas ini meliputi adanya payung kebijakan pemulihan ekonomi desa berbasis pemberdayaan masyarakat, antusiasme serta partisipasi aktif yang masif dari warga setempat, hingga pemenuhan sarana, prasarana, logistik, beserta material tekstil yang representatif. Kendati demikian, berbagai stimulan positif tersebut belum mampu mendongkrak keberhasilan program secara holistik karena terganjal oleh sejumlah resistensi struktural. Faktor penghambat yang paling krusial meliputi renggangnya sinergi lanjutan pasca-pelatihan, minimnya strategi diseminasi informasi kelembagaan yang komprehensif, serta lemahnya jalinan komunikasi interaktif antara pemerintah desa, pelaksana teknis, dan para peserta. Kompleksitas hambatan komunikasi dan ketiadaan tindak lanjut pendampingan inilah yang pada akhirnya menjadi pemicu utama mengapa program pembekalan kriya lokal sasirangan di wilayah ini belum mampu menstimulasi kemandirian ekonomi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Amrizal, D., Dalimunthe, A. H., & Yusriati. 2018. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.

Angrayni, Lysa, dan Yusliati. 2018. *Efektivitas Organisasi*. Indragiri Hulu: CV Budi Utama.

Armstrong, M. (2016). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (14th ed.). London: Kogan Page.

Beni. (2016). *Pengantar Administrasi Publik dan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

Budiani. (2018). *Efektivitas Program dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers

Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..

Fiantika, F. R., dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Priansa, Donni Juni. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.

Rukin. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.